

Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global

Oleh : Pebri Tuwanto

Abstrak

Pembangunan ekonomi suatu negara sesungguhnya bertautan erat dengan proses globalisasi yang berjalan. Berangkat dari sebuah prinsip dasar dimana hak-hak individu yang menjunjung tinggi kebebasan harus diperjuangkan melebihi hak pemerintah atau kelompok sosial, lalu mengerucut pada tuntutan atas privatisasi, fundamentalisme pasar bebas, dan peran negara yang minimal mulai memberikan tekanan terhadap industri-industri strategis nasional termasuk industri pertahanan. Melalui penelusuran atas trajektori sejarah secara umum dinamika pertahanan dan keamanan dunia yang berjalan dalam berbagai era, diperoleh gambaran bahwa orientasi industri pertahanan kini telah bergeser menjadi sektor bisnis yang memberi keuntungan tinggi. Kini atas dasar efisiensi dan mencegah perilaku koruptif, industri pertahanan dituntut untuk menerima agenda-agenda pengurangan peran negara demi terciptanya keuntungan yang maksimal.

Kata kunci: Industri Pertahanan, Globalisasi, Ekonomi

I. Pendahuluan

Dewasa ini industri pertahanan suatu negara memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Industri pertahanan yang dimaksud disini adalah industri yang berorientasi pada produksi alat-alat kebutuhan pertahanan, yang meliputi alat utama system senjata (alutsista), baik itu senjata ringan, senjata berat, maupun kendaraan tempur, kendaraan pendukung kegiatan pertahanan, serta pemeliharaan dan perbaikannya. Selaku negara berkembang yang senantiasa berkuat dengan isu mengenai pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari warganya, isu pembangunan industri pertahanan kurang mendapat perhatian. Padahal industri pertahanan juga dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional dan percaturan perekonomian global. Disamping fungsinya yang menunjang sistem keamanan nasional seperti pemantauan lalu lintas udara suatu negara atau mencegah adanya pencurian ikan, industri pertahanan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Seorang ekonom klasik, Emile Benoit, bahkan menegaskan bahwa pengeluaran anggaran pertahanan yang besar memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kecilnya anggaran suatu negara akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin lambat.¹ Hal ini dapat dipahami mengingat semakin majunya industri pertahanan maka secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan industri lain karena memiliki banyak *multiple linkage* dari hulu hingga hilir, mendorong percepatan kemajuan teknologi, hingga menekan besarnya anggaran yang biasanya dikeluarkan untuk mengimpor berbagai alatista dari luar negeri.

Pro kontra perihal pembangunan industri pertahanan terus bergulir hingga saat ini. Di satu sisi pembangunan industri pertahanan nasional tentu membutuhkan campur tangan negara dari berbagai aspek, karena konsumen atau pengguna (*user*) dari produknya bersifat monopoli, yaitu negara (TNI atau negara lain yang memesan dengan persetujuan negara). Namun, disisi lain pembangunan perekonomian dalam era global yang dibangun berdasarkan gagasan terselenggaranya pasar bebas dengan meminimalisasi peran negara serta penghapusan berbagai hambatan perdagangan biasanya berujung pada privatisasi. Sebagai contohnya dalam Permenhan No. 24 tahun 2010 tentang Masterplan Industri Pertahanan telah menetapkan PT. PAL, PT. DI,

¹ Emile Benoit, *Economic Development and Cultural Change*, Vol 26, No.2, 1978, Lexington : Lexington Books, hlm. 271-280

PT. Pindad, PT. Dahana, PT. Len, PT. Inti dan PT. Krakatau Steel (KS) sebagai industri pertahanan, tetapi PT. KS melaksanakan penjualan saham pada tahun 2010, padahal dalam pasal 9 PP No. 33 tahun 2005 tentang cara privatisasi perusahaan (persero) menyatakan bahwa persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan tidak dapat privatisasi.

Silang pendapat lain adalah dalam hal alokasi anggaran untuk alutista. Dalam pandangan neoliberalisme, alokasi anggaran untuk alutista tentu dianggap sebagai penghamburan keuangan negara jika militer tidak berperan dalam mengamankan operasi pasar. Meski begitu pasar perdagangan senjata semakin berkembang dan bergairah karena negara-negara berkembang atau negara yang sedang terlibat perang terus membuka keran impor mereka melalui pembelian peralatan pertahanan. Indonesia khususnya terus meningkatkan anggaran untuk belanja bidang pertahanan yang meningkat tiga kali lipat dari Rp30,7 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp92,1 triliun pada tahun 2014². Pemerintah sendiri berdalih bahwa peningkatan anggaran ini dalam rangka pemenuhan MEF (*Minimum Essential Force*) yang harus dicapai paling lambat pada tahun 2024. Keadaan ini tentu menjadi dilema bagi Indonesia karena disatu sisi pemerintah dituntut untuk mengalokasikan anggaran guna mengimpor alutista modern berteknologi canggih demi mencapai target MES, namun disisi lain juga didesak untuk melakukan pembangunan industri pertahanan.

Berpijak pada latar belakang tersebut tulisan ini akan mengulas sekelumit kajian historis mengenai trajektori sejarah orientasi perdagangan peralatan pertahanan dunia, karena penulis percaya bahwa segala hal yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika perdagangan persenjataan yang berjalan di era sebelumnya. Lebih dalam lagi akan dibahas bagaimana arah kebijakan pembangunan industri pertahanan nasional di era global. Penulis menggunakan pendekatan pluralis, dimana pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa selain negara, terdapat juga kelompok masyarakat, bahkan individu yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan internasional dan bahwa negara bukanlah aktor tunggal yang kebijakannya dianggap selalu dapat memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat.³ Melalui pendekatan ini, peran aktor nonnegara baik di tingkat nasional maupun internasional,

² Rezki Saputra, 15 Juni 2014, *BPK: Alokasi Anggaran Alutsista Tak Relevan dengan Realisasi* <http://www.infobanknews.com/2014/06/bpk-alokasi-anggaran-alutsista-tak-relevan-dengan-realisasi/>, diakses pada 9 Juni 2015, pukul 21.00 WIB

³ FX. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 146

serta organisasi internasional (IMF, WTO, World Bank), atau berbagai LSM dan NGO yang dipercaya memiliki pengaruh dalam pembangunan industri pertahanan nasional di era globalisasi.

II. Pembahasan

A. Kajian Historis Perkembangan Orientasi Industri Pertahanan

Pada awalnya ketika negara-negara di dunia masih menganut sistem monarkhi absolut, berbagai produk persenjataan dan militer diproduksi dan digunakan untuk meneguhkan hegemoni kekuasaan raja yang mutlak atas rakyatnya dalam rangka menjaga kekuasaannya sendiri termasuk melalui jalan berperang dengan negara lain. Demi melanggengkan kekuasaannya banyak negara yang melakukan pengembangan kekuasaan di luar batas wilayahnya untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah lain. Berbagai macam persenjataan diproduksi dan dibuat khususnya untuk menjalankan agenda kolonialisme yang berlangsung di wilayah jajahannya. Pasca runtuhnya sistem monarkhi absolut melalui revolusi Prancis yang dilatarbelakangi oleh aliran rasionalisme, dimana mengerucut pada pemahaman bahwa kedaulatan rakyat adalah satu-satunya paham yang benar karena manusia dilahirkan sama derajatnya⁴, tidak merubah orientasi perdagangan persenjataan dunia. Berbagai macam alatista terus diproduksi untuk kepentingan negara tersebut, utamanya dalam hal kolonialisme. Sehingga pada era ini industri pertahanan bukan hanya berorientasi pada negara dalam rangka menjaga kekuasaannya melalui peningkatan jumlah tentara untuk berperang namun juga mulai bergeser sedikit untuk kepentingan ekonomi negara tersebut. Pada era ini pula mulai terlihat pengamanan sumber-sumber suplai komoditas perdagangan utama untuk konsumsi negara penjajah, sebagai contohnya adalah keberhasilan VOC di Nusantara pertama-tama adalah karena didorong untuk mempertanggungjawabkan keuntungan kepada pemegang saham di Belanda dan menarik lebih banyak investor di negeri jajahan Hindia Belanda. Disini militer

⁴ FX Adji Samekto, "Meningkatkan Relevansi Studi Hukum Internasional dalam Tatanan Sosial yang Berubah" (Makalah diajukan pada pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Internasional, Purwokerto, 16-17 Maret 2005), hlm. 5-6

dikembangkan untuk mengamankan supply komoditas perdagangan dari negeri jajahan demi pembangunan ekonomi di negeri penjajah.⁵

Pada periode perang dunia, militer dan bisnis adalah dua kutub yang sulit dipertemukan. Kaum kapitalis tidak suka dengan militer yang dianggap menghambur-hamburkan uang negara yang dipungut dari pajak, sedangkan kaum militer menganggap pebisnis hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan negara.⁶ Pada masa ini mulai terlihat tarik menarik kepentingan dan arah orientasi industri pertahanan di masa selanjutnya, yaitu pasca perang dunia atau era perang dingin. Kerugian besar yang diderita negara-negara akibat perang dunia mengakibatkan banyak negara mulai mencari alternatif lain untuk memulihkan dan mengembangkan perekonomiannya (*economic recovery*). Melalui berbagai institusi internasional seperti IMF, World Bank, WTO negara-negara mencari jalan baru demi kepentingan ekonomi mereka, termasuk di industri pertahanan.

Pasca perang dunia kedua, banyak perwira militer yang ditarik oleh perusahaan besar untuk menempati posisi strategis dalam perusahaan. Hal ini didorong sekurang-kurangnya tiga hal, yakni untuk memanfaatkan pengalaman dan strategi militer dalam strategi bisnis, menangkap peluang produksi persenjataan yang dipesan negara, dan memanfaatkan nama besar para perwira untuk lobby bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.⁷ Pada periode inilah industri pertahanan menjadi industri strategis dalam perekonomian negara, seiring dengan ketegangan politik global antara Blok Barat dan Blok Timur dengan pasarnya adalah negara berkembang.

Berakhirnya perang dingin menandai berakhirnya konflik ideologi barat (kapitalis) dengan ideologi komunis. Kemudian dapat juga disebutkan dengan berakhirnya Perang Dingin maka kapitalisme semakin mengglobal, termasuk gagasan demokrasi dan ekonomi pasar.⁸ Yang menarik di era ini adalah berbagai negara menggunakan industri militernya sebagai jalan untuk meraih kepentingan ekonomi. Amerika Serikat (AS) pun mengubah orientasi pembangunan

⁵ Don K. Marut, Fiskalisme Militer di Indonesia: Dari Otoritarianisme ke Neoliberalisme, http://lama.elsam.or.id/downloads/1326857981_Don_K._Marut_-_Fiskalisme_Militer_di_Indonesia.....pdf, diakses pada 9 Juni 2015 pukul 22.00

⁶ Samuel P Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil Military Relations*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1957, hlm. 361

⁷ Don K Marut, *Op. Cit*, hlm. 4

⁸ FX Adji Samekto, *Op. Cit*, hlm. 20

militernya agar selaras dengan kebutuhan untuk menyetatkan sektor ekonomi secara umum, dengan memasukkan prinsip manajerial dunia bisnis dalam dunia kemiliteran⁹.

Perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa ancaman terhadap keamanan dunia mulai mengalami pergeseran dan berkembang dalam berbagai macam bentuk. Perang dingin memang usai, namun aliansi pertahanan tetap ada dan ancaman terhadap kedamaian dunia semakin variatif sehingga industri pertahanan tetap menemukan perannya. Ancaman-ancaman yang berasal dari *non-state actor* seperti terorisme, kejahatan transnasional, penyakit, dan bencana alam saat ini menjadi pasar bagi industri pertahanan. Misalnya saja dalam hal bencana alam, meskipun beberapa orang memandangnya sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, tetapi bagi beberapa kalangan justru menjadi peluang untuk meraup keuntungan melalui industri pertahanan. Bencana Katrina di Louisiana, Amerika Serikat adalah salah satu bentuk *recovery* yang membutuhkan waktu pemulihan terbilang lama. Penanganan bencana Katrina merupakan salah satu wujud nyata dari bagaimana bencana dipakai sebagai momen untuk mengurangi peran negara dan membiarkan kekuatan pasar yang menjadi pemain utama serta sekaligus moment untuk mengubah *landscape social-economy* berbasis komunitas dan dikendalikan secara publik (negara) menjadi sistem *social-economy* pasar bebas.¹⁰

B. Kebijakan pembangunan Industri pertahanan Indonesia di era global

Jika globalisasi hanya diatur oleh hukum pasar yang diterapkan menurut kehendak pihak yang berkuasa, konsekuensinya tidak bisa tidak akan negatif. Ini termasuk, misalnya absolutisasi ekonomi, pengangguran, pemburukan layanan publik, pencemaran lingkungan hidup, kesenjangan makin lebar antara si kaya dan si miskin, dan kompetisi tidak adil yang membuat bangsa miskin semakin inferior. Di banyak negeri di Amerika sistem yang dikenal sebagai neoliberalisme makin lama makin unggul, berdasarkan konsep manusia yang murni ekonomik, sistem ini melihat keuntungan dan hukum pasar

⁹ Silmi Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm.395

¹⁰ Don K. Marut, *Op. Cit*, hlm. 8

*sebagai satu-satunya parameter, dengan mengorbankan martabat dan penghormatan pada individu manusia.*¹¹

Pendapat tersebut disampaikan oleh seorang Uskup Agung Krakow, Karol Wojtyla, yang gelisah terhadap fenomena globalisasi yang tengah berjalan. Begitu pula di Indonesia, industri pertahanan yang tengah tumbuh, perlahan mulai terancam oleh sistem perekonomian global dimana tuntutan atas pengurangan peran negara sangat kuat. Pertimbangannya adalah soal perilaku koruptif dan inefisiensi yang selalu muncul pada berbagai BUMN. Berangkat dari pengelolaan yang buruk, hingga mengerucut menjadi keraguan terhadap kualitas produk yang dihasilkan, proses pengiriman (*delivery*) produk yang terlambat, serta ketidakmampuan industri strategis ini memberikan layanan purna jual. Terdapat pula pertanyaan terhadap transparansi pemerintah dalam perencanaan pengadaan alutista.¹² Sehingga wacana atas privatisasi industri pertahanan dengan memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap mekanisme pasar, karena dipercaya mampu meningkatkan investasi serta memacu timbulnya berbagai ide baru untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meredam konflik-konflik horizontal semakin gencar mendesak industri pertahanan nasional. Namun apakah pilihan privatisasi serta memberi kepercayaan terhadap mekanisme pasar adalah pilihan yang tepat dalam pengembangan industri pertahanan?

Industri pertahanan nasional bukanlah industri yang hanya dipandang dari aspek ekonomis semata, meskipun perkembangannya orientasi industri pertahanan di berbagai negara di dunia telah menjadi salah satu sektor yang menguntungkan. Dalam industri ini terdapat peran dari negara sebagai pemegang saham terbesar terhadap kepentingan keamanan negaranya masing-masing. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa industri pertahanan sarat akan *national interest* dari negara tersebut, yang apabila diserahkan seluruhnya pada pencarian keuntungan semata akan mengancam kepentingan dari negara tersebut. Bisa dibayangkan apabila senjata-senjata buatan Indonesia dijual ke negara lain, dan dipergunakan untuk kepentingan yang merugikan Indonesia suatu saat kelak (perang, pencurian SDA). Selain itu dalam Buku Putih Pertahanan 2008 disebutkan bahwa penyelenggaraan pertahanan Indonesia tidak diwujudkan

¹¹ John Micklethwait dan Adrian Woldridge, *A future perfect, The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, hlm 395

¹² Silmi Karim, *Op. Cit*, hlm. 146-155

semata-mata untuk perang, tapi juga perdamaian. Lalu siapakah yang bisa menjamin bahwa produk-produk industri pertahanan yang telah dijual tidak dipergunakan untuk berperang.

Berangkat dari perannya yang strategis dan karakternya yang khas (menegakkan kedaulatan dan keamanan) maka tidak heran desain industri pertahanan Indonesia menganut pendekatan negara-sentris, dimana negara mengelola sepenuhnya dari hulu hingga hilir.¹³ Peran negara disini terdapat tiga macam, yaitu sebagai *customer*, *sponsor*, dan *regulator*. *Pertama*, sebagai *customer* tidak bisa dilepaskan dari karakteristik sektor pertahanan yang monopsoni, dimana pemerintah adalah *customer* yang paling utama atau bahkan satu-satunya. Sehingga disini pemerintah yang menentukan demand bagi industri pertahanan. *Kedua*, sebagai sponsor pemerintah artinya melindungi, mempromosikan, dan memberdayakan industri pertahanan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melindungi fungsi negara. Misalnya saja bentuk sponsorship dari AS yang memberikan kontrak hingga US\$450 miliar tiap tahun kepada Dephan AS untuk pengadaan barang dan jasa. *Ketiga*, sebagai regulator artinya negara memiliki mekanisme kontrol terhadap sektor industri yang menyokong pertahanan negara, seperti kontrol informasi dan kontrol ekspor. Oleh karena itu tidak setiap permasalahan ekonomi, khususnya pembangunan industri pertahanan dapat diselesaikan melalui jalan privatisasi, fundamentalisme pasar bebas, dan peran negara yang diminimalkan karena peran negara itu sendiri yang krusial.

Contoh lain peran negara dalam dalam industri pertahanan di era global adalah peran pemerintah AS dalam industri pertahanannya. Sejak tahun 2000, pemerintah AS menginisiasi proyek pembuatan pesawat tempur paling canggih (generasi kelima), yaitu JSF (Joint Strike Fighter) F-35. Pesawat ini ditujukan untuk memodernkan banyak pesawat tempur milik AS, yang konsumennya diperluas ke banyak sekutu AS (NATO, Australia, Eropa). AS yang negara kiblatnya ekonomi liberal, ternyata tidak menyerahkan sepenuhnya proyek ini kepada industri pertahanan. Dephan AS justru yang menginisiasi program ini, termasuk menyediakan dana riset awal dengan penentuan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Lalu didapatkan dua calon kontraktor yang bersaing mendapatkan proyek (tender): Lockheed Martin (produsen hampir semua pesawat tempur unggulan AS) dan Boeing (produsen pesawat komersial yang ingin ikut menjajaki bidang militer). Kedua perusahaan ini diberikan dana riset yang sama, lalu di tengah jalan banyak terjadi

¹³ *Ibid.*, hlm. 47

penyesuaian sehingga dana risetnya ditambah. Lalu setiap negara pemesan boleh meminta *customize* tertentu, tapi otoritas tetap ada di Dephan AS. Jadi pemerintah AS (Dephan) bertindak sangat dominan dan bahkan tidak lagi menerapkan yang umumnya disebut “mekanisme pasar” tersebut. Dephan AS memegang monopoli dan menentukan sampai hal-hal detil setiap “*do and don't*”.¹⁴

Industri pertahanan nasional pernah mengalami masa-masa suram ketika ketika *Letter of Intent* (LoI) dari IMF yang memaksa Indonesia untuk menghentikan proyek-proyek strategis berbiaya besar, yang berdampak pada matinya Industri Pertahanan kala itu. Belum usai sampai disitu, AS dan sekutunya meberlakukan embargo militer terhadap Indonesia pada 1999-2005 terkait dengan dugaan pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor-Timur (kini Timor Leste)¹⁵. Kini semua hal suram itu telah dilalui, selanjutnya tinggal bagaimana mempersiapkan industri pertahanan menghadapi era global. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya negara memiliki tiga peran dalam pembangunan industri pertahanan nasional, yakni customer, sponsor, dan regulator. Disamping itu terdapat pula peran sektor swasta dan berbagai organisasi internasional. Sehingga demi tercapainya pembangunan yang optimal, diperlukan *affirmative policy* atas industri tersebut utamanya atas kebijakan anggaran dan kebijakan pengadaan. Perhatian bukan hanya pada regulasi dan kebijakan, tetapi juga kebijakan yang terpadu dengan aspek finansial, seperti mendorong industri pendukung agar terintegrasi dari hulu ke hilir, hingga pemberian bantuan modal bagi industri pertahanan termasuk dukungan insentif perpajakan (fiskal) untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan penguasaan teknologinya dan negara dapat mengambil peran didalamnya.

III. Kesimpulan

Peristiwa-peristiwa global yang terjadi dalam sejarah senantiasa memberikan fondasi bagi era berikutnya. Perang dunia mempersiapkan jalan bagi dekade-dekade selanjutnya yakni perang dingin. Perang dingin berakhir dan berganti dengan fondasi sistem pasar yang universal. Begitu

¹⁴ Habibi Yusuf Sarjono, 28 September 2010, *Peran Strategis Pembangunan Industri Pertahanan*, <http://www.tandef.net/peran-strategis-pembangunan-industri-pertahanan>, diakses pada 10 Juni 2015, pukul 23.20 WIB

¹⁵ Ramdhan Muhaimin, 18 Januari 2012, *TNI Waspadai Embargo*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/18/lxzx8j-tni-tetap-waspadai-embargo>, diakses pada 10 8 Juni 2015, pukul 22.50 WIB

pula dinamika perdagangan alutista antarnegara senantiasa berubah dari waktu ke waktu, dari orientasinya yang hanya untuk kepentingan keamanan dan kekuasaan dari negara itu sendiri, hingga menjadi salah satu sektor untuk meraih keuntungan ekonomi. Globalisasi yang sarat akan agenda Neoliberalisme dengan soko gurunya antara lain privatisasi, fundamentalisme pasar bebas, dan peran negara yang minimal berdampak terhadap berbagai industri strategis di berbagai negara, termasuk industri pertahanan. Pertimbangan pengelolaan yang buruk, efisiensi, dan perilaku koruptif dalam BUMN semakin menyudutkan posisi industri pertahanan agar memenuhi tuntutan agenda neoliberalisme. Agenda-agenda tersebut memang menawarkan perkembangan industri pertahanan yang lebih baik dalam hal kesempatan ekonomis, serta kebebasan politik. Namun tidak semua permasalahan dalam industri pertahanan dapat diselesaikan hanya dengan menyerahkan pada mekanisme pasar untuk selanjutnya melakukan privatisasi sebagai pengurangan peran negara. Perlu dipahami bahwa industri pertahanan bukanlah industri yang hanya bisa dilihat dari aspek ekonomis semata tetapi juga industri strategis dengan karakter khusus yang berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara. Sehingga dalam hal industri pertahanan, negara berhak untuk memberikan *affirmative policy* demi pengembangan dan kemajuannya di masa yang akan datang. Kedepan tuntutan-tuntutan atas klausul lingkungan hidup dan hak-hak buruh sebagai standar global akan semakin kuat menekan industri strategis ini, sehingga negara harus mengantisipasinya dan mempersiapkannya sejak dini sebelum masalah tersebut semakin meruncing dan mendesak industri pertahanan nasional.